

## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah tentang penyiaran merupakan tonggak desentralisasi bidang penyiaran. Televisi yang bersiaran di pusat ingin menyiarkan tayangan ke daerah diwajibkan untuk mendirikan stasiun yang menjadi daerah layanan penyiaran televisi tersebut. Salah satu stasiun televisi yang tidak lepas dari peraturan tersebut adalah Indosiar. Konsep televisi jaringan mengharuskan Indosiar untuk melepaskan frekuensi kepada daerah, salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan manajemen penyiaran Indosiar Yogyakarta sebagai stasiun televisi berjaringan dalam melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016, khususnya pada pasal 15 ayat 1-3 tentang program siaran lokal, dan pasal 16 ayat 1-2 porsi dan jam tayang siaran lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui: 1)wawancara mendalam kepada ketua koordinator dan kru Indosiar Yogyakarta. 2)observasi. 3)studi dokumentasi. Wawancara kepada Ketua komisioner KPID Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai validitas data penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik QDA (*Qualitative Data Analysis*) yakni dengan memperhatikan, mengumpulkan, dan berfikir. Penelitian ini mengacu pada teori ekonomi politik media yang disampaikan oleh Vincent Moskow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang diterapkan oleh Indosiar Yogyakarta dalam prosesnya masih sangat tergantung pada stasiun pusat, terutama tentang siaran lokal. Implementasi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang penyiaran telah terlaksana, namun belum dalam kondisi idealnya, masih ada terdapat masalah yang perlu diperbaiki oleh pihak manajemen pusat dan daerah.

Kata kunci : manajemen, jaringan, televisi, peraturan daerah, indosiar

## ABSTRACT

*Broadcasting regulation number 32 of 2002 and local government regulation on Broadcasting are the decentralization milestones in broadcasting field. The holding station which want to broadcast in its networking have to establish regional station as networking service itself. One of the television stations that must be obey the regulation is Indosiar. The concept of network regulation requires Indosiar to release frequencies to the regions, one of which is the Special Region of Yogyakarta. This research objectives is to find out and describe Indosiar Yogyakarta broadcasting management as a networked television station in implementing local government regulation of Yogyakarta Number 13 of 2016, especially in article 15 paragraph 1-3 about concerning local broadcasting programs, and article 16 paragraph 1-2 about portions and local broadcast hours. The method used is qualitative with descriptive case study approach. The data was obtained through: 1) in-depth interview with Indosiar Yogyakarta's coordinator and production crew 2) observation 3) documentation study. Interview with the chairperson of KPID Yogyakarta were used as validity. The data analysis technique used in this research is QDA (Qualitative Data Analysis) that has technique by paying attention, collecting, and thinking. This research refers to political economy of media theory by Vincent Moscow. The research has shown that the management procces in Indosiar Yogyakarta is still very dependent on the main station. Implementation in implementing local government regulation of broadcasting number 13 of 2016 has been carried out, but not yet in ideal conditions. There are problems that need to be corrected by central and regional management.*

*Keyword: management, network, television, regulation, local government, indosiar*